

**Judul** : Program imunisasi, legislator sebut belum level aman  
**Tanggal** : Kamis, 25 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 9

Program Imunisasi

## Legislator Sebut Belum Level Aman

ANGGOTA Komisi IX DPR M Haris menyoroti capaian program imunisasi nasional yang saat ini belum berada di level aman. Sejumlah indikator capaian imunisasi menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Kata dia, imunisasi primer lengkap baru 30,1 persen dan baduta baru 28,2 persen. "Sedangkan Imunisasi T2 Plus ibu hamil 27,8 persen, serta program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 2025 turun jadi 82,5 persen," ujarnya saat rakor Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kondisi itu, menurut Haris, menunjukkan tantangan pelaksanaan program imunisasi nasional tidak cukup dijawab melalui kampanye semata. Penguatan berbagai aspek pendukung mutlak dilakukan agar target Pemerintah tercapai secara optimal, mulai dari sisi vaksin, distribusi, rantai dingin, tenaga kesehatan, posyandu, kader, hingga biaya operasional.

Berikutnya, Haris menyoroti rendahnya capaian imunisasi bayi lengkap tahun 2026. Pasalnya, dari data Kemenkes baru empat provinsi berhasil mencapai

target, yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Karena itu, Pemerintah harus segera mencari solusi tepat untuk menekan kesenjangan antarwilayah.

Komisi IX, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan sistem imunisasi nasional agar pelayanan dasar terjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan angka cakupan, melainkan juga kesiapan ekosistem penopang. "Penguatan seluruh sistem pendukung membuat target nasional tercapai demi optimalnya perlindungan warga," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menambahkan, rendahnya cakupan dipicu maraknya disinformasi di masyarakat. Berbagai informasi tidak benar masih jadi alasan utama sebagian masyarakat menolak vaksinasi. Makanya, Pemerintah didorong mengambil langkah konkret untuk mengatasi hoaks yang menghambat program nasional itu.

Menurutnya, Indonesia masuk ke 10 negara di dunia dengan jumlah *zero dose* atau bayi belum imunisasi pertama sampai umur



M Haris

12 bulan terbanyak. "Itu harus jadi perhatian bersama karena berpotensi meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi," ingatnya.

Dia mempertanyakan efektivitas upaya Pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi kelompok rentan yang kini masih berada di kisaran 30 persen selama enam bulan terakhir. Dengan situasi itu, Kemenkes harus menyampaikan strategi konkret untuk menekan disinformasi dan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap program rutin itu.

Irma menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, melainkan kemampuan Pemerintah membangun komunikasi publik efektif melawan *hoaks*. "Edukasi berbasis data serta pelibatan elemen masyarakat harus diperkuat agar target nasional tercapai guna melindungi seluruh generasi muda dari ancaman penyakit berbahaya," tegasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin memaparkan, Pemerintah telah memperluas cakupan imunisasi rutin wajib bagi para bayi. Pelayanan di Indonesia saat ini mencakup 14 jenis vaksin atau antigen guna melindungi segenap generasi muda dari berbagai ancaman infeksi penyakit menular yang berbahaya.

Budi menjelaskan, Pemerintah membagi pemantauan ke dalam tiga kelompok sasaran utama yaitu bayi, baduta, serta anak sekolah. "Adapun capaian imunisasi bayi lengkap sebesar 24,3 persen pada periode 2025 berhasil naik jadi 30,1 persen pada 2026, atau meningkat sebesar 5,8 persen," terangnya.

Berikutnya, cakupan baduta tercatat 21,8 persen pada 2025 dan naik jadi 28,2 persen pada 2026. Untuk anak sekolah, angka 2024 sebesar 91,2 persen turun jadi 82,5 persen pada 2025 sehingga memerlukan intervensi khusus serta koordinasi erat dengan pihak sekolah dan orang tua.

Sementara itu, kesadaran kelompok dewasa melakukan imunisasi lanjutan menunjukkan tren positif dan merangkak naik. Untuk itu, Pemerintah Pusat konsisten mendorong Pemda, fasilitas kesehatan, serta tenaga medis untuk mengejar target cakupan perlindungan rutin agar seluruh anak Indonesia memperoleh payung proteksi layanan kesehatan secara merata.

Rendahnya cakupan di beberapa wilayah, lanjut Budi, berisiko meningkatkan kejadian luar biasa penyakit menular seperti campak. Makanya, pihaknya terus memperkuat edukasi agar orang tua tidak ragu membawa anak mereka mendapatkan pelayanan imunisasi terjadwal. "Karena langkah pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati," tandasnya. ■ PYB